

---

# PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM REGIONAL DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN BANTEN

Siti Balya Kias Faras<sup>1</sup>, Moh. Mukhsin<sup>2</sup>, M. Ainun Najib<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

sitibalyakiasfaras@gmail.com<sup>1</sup>, mohmukhsin.mm@gmail.com<sup>2</sup>,

ainun.najib@untirta.ac.id<sup>3</sup>

## Abstrak

The study was carried out with the objective of analyzing the effect of Human Development Index, Regional Minimum Wage and Unemployment on the Poverty in Banten Province in the Perspective of Islamic Economics in 2017-2021. This research utilizes secondary data sources by Central Statistics Agency (BPS) and other related sources. The study employed panel data regression as its research method, with the Eviews9 program being used for analysis. Based on the findings of this study, it can be concluded that: (1) Human Development Index have negative and insignificant effect to povety; (2) Regional Minimum Wage have positive and significant effect to poverty; (3) Unemployment have positive and significant effect to poverty; (4) Independent variables exert a simultaneous influence on the dependent variable. This research aims to help the government to prioritize poverty alleviation programs to reduce poverty rates in Banten Province.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten dalam Perspektif Ekonomi Islam pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan regresi data panel sebagai metode penelitiannya, dengan menggunakan program Eviews12 sebagai alat analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penduduk miskin; (2) Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin; (3) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin; (4) Variabel-variabel independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memprioritaskan program-program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

**Kata kunci:** *Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin*

---

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh setiap negara di dunia. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari masalah tersebut. Banten memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Banten menempati urutan ke-9 dalam tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari tahun 2017 hingga 2019, jumlah penduduk miskin Banten terjadi penurunan sebesar 20,58 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2019 hingga 2021 jumlah penduduk miskin di Banten mengalami peningkatan, yaitu sebesar 212,77 ribu jiwa ((Badan Pusat Statistik, n.d.)). Peningkatan angka kemiskinan lebih besar daripada penurunannya. Padahal Provinsi Banten memiliki banyak sekali potensi. Mulai dari alam yang kaya akan sumber daya, potensi pariwisata yang besar, monumen bersejarah yang masih terjaga, dan kawasan industri yang besar. Dengan potensi yang banyak tersebut, seharusnya dapat membuka dan menampung lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Provinsi Banten, sehingga dengan banyaknya lowongan pekerjaan tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten. Namun saat ini kemiskinan di Provinsi Banten masih tinggi.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten (Ribu Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	117,31	116,16	114,09	120,44	131,43
Kabupaten Lebak	111,08	108,81	107,93	120,83	134,75
Kabupaten Tangerang	191,62	190,05	193,97	242,16	272,35
Kabupaten Serang	69,10	64,46	61,54	74,80	83,09
Kota Tangerang	105,34	103,49	98,37	118,22	134,24
Kota Cilegon	14,89	13,96	13,20	16,31	18,89
Kota Serang	36,97	36,21	36,21	42,24	47,91
Kota Tangerang Selatan	28,73	28,21	29,16	40,99	44,57
<b>Provinsi Banten</b>	<b>675,04</b>	<b>661,36</b>	<b>654,46</b>	<b>775,99</b>	<b>867,23</b>

Sumber: (BPS, 2022)

Indeks pembangunan manusia Banten menempati urutan ke-8 di Indonesia. Angka Indeks Pembangunan Manusia Banten pada tahun 2021 masuk dalam kategori tinggi. Kategori ini telah dicapai sejak tahun 2015 dan tidak mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak banyak perubahan dalam pertambahan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada era digital saat ini standar kehidupan semakin tinggi dan sistem pendidikan semakin kompleks. Mudah-mudahan pertukaran informasi membuat batas negara tidak terlihat menjadikan perkembangan pendidikan semakin maju dan manusia banyak

dituntut untuk lebih menguasai ilmu baru contohnya dalam bidang teknologi informasi. Selain itu multilinguistik menjadi hal yang lazim dengan minimal menguasai 2 bahasa yaitu bahasa nasional dan bahasa internasional. Sehingga angka melek huruf bisa dikatakan cukup rendah untuk dijadikan standar sebagai alat ukur kualitas pendidikan. Disamping itu, membaca bukan hal yang sulit untuk dipelajari tapi bagaimana seseorang dapat mengingat yang ia baca, menjelaskan dan mengimplementasikan yang dibaca adalah yang terpenting.

Selain itu, pada saat ini kualifikasi pekerjaan yang banyak dibutuhkan perusahaan ialah minimal Diploma 3 maupun Strata 1. Keahlian dan pengalaman juga banyak diperhitungkan dalam dunia kerja. Ada banyak keahlian dan pelajaran yang tidak didapatkan di sekolah sehingga untuk mengukur kualitas pendidikan menggunakan angka partisipasi SD, SMP, dan SMA cukup rendah dan kurang relevan.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Banten				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	63,82	64,34	64,91	65	65,17
Kabupaten Lebak	62,95	63,37	63,88	63,91	64,03
Kabupaten Tangerang	70,97	71,59	71,93	71,92	72,29
Kabupaten Serang	65,6	65,93	66,38	66,7	66,82
Kota Tangerang	77,01	77,92	78,43	78,25	78,5
Kota Cilegon	72,29	72,65	73,01	73,05	73,35
Kota Serang	71,31	71,68	72,1	72,16	72,44
Kota Tangerang Selatan	80,84	81,17	81,48	81,36	81,6
<b>Provinsi Banten</b>	<b>71,42</b>	<b>71,95</b>	<b>72,44</b>	<b>72,45</b>	<b>72,72</b>

Sumber: (BPS, 2022)

Upah minimum regional adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Indonesia memiliki upah yang rendah dibandingkan dengan negara lain, yang merupakan masalah di pasar tenaga kerja. Banyak investor asing yang berinvestasi di Indonesia karena biaya yang dikeluarkan untuk menggaji pekerja lebih sedikit dan keuntungan yang didapatkan investor akan lebih banyak. Selain itu, beberapa daerah di Banten seperti Pandeglang dan Lebak masih memiliki upah minimum yang rendah. Banyak juga perusahaan yang tidak menggaji karyawan sesuai upah minimum regional.

Tabel 3. Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Banten (IDR)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	Rp2.164.979	Rp2.363.549	Rp2.542.539	Rp2.758.909	Rp2.800.293
Kabupaten Lebak	Rp2.127.112	Rp2.312.384	Rp2.498.068	Rp2.710.654	Rp2.751.314
Kabupaten Tangerang	Rp3.270.936	Rp3.555.835	Rp3.841.368	Rp4.168.268	Rp4.230.793
Kabupaten Serang	Rp3.258.866	Rp3.542.714	Rp3.827.193	Rp4.152.887	Rp4.215.181
Kota Tangerang	Rp3.295.075	Rp3.582.077	Rp3.869.717	Rp4.199.029	Rp4.262.015
Kota Cilegon	Rp3.331.997	Rp3.622.215	Rp3.913.078	Rp4.246.081	Rp4.309.773
Kota Serang	Rp2.866.595	Rp3.116.276	Rp3.366.512	Rp3.773.940	Rp3.830.549
Kota Tangerang Selatan	Rp3.270.936	Rp3.555.835	Rp3.841.368	Rp4.168.268	Rp4.230.793
<b>Provinsi Banten</b>	<b>Rp1.931.180</b>	<b>Rp2.099.385</b>	<b>Rp2.267.990</b>	<b>Rp2.460.996</b>	<b>Rp2.460.996</b>

Sumber: (BPS, 2022)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator kemiskinan yang krusial. Jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan, maka tidak ada pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka masyarakat dianggap miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika tingkat pengangguran tinggi maka kemiskinan juga tinggi.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	8.30	8.19	8.67	9.15	7.70
Kabupaten Lebak	8.88	7.57	7.96	9.63	7.86
Kabupaten Tangerang	10.57	9.63	8.92	13.06	9.06
Kabupaten Serang	13.00	12.63	10.58	12.22	10.58
Kota Tangerang	7.16	7.39	7.14	8.63	9.07
Kota Cilegon	11.88	9.21	9.64	12.69	10.13
Kota Serang	8.43	8.10	8.07	9.26	9.41
Kota Tangerang Selatan	6.83	4.67	4.78	8.48	8.60
<b>Provinsi Banten</b>	<b>9.28</b>	<b>8.47</b>	<b>8.11</b>	<b>10.64</b>	<b>8.98</b>

Sumber: (BPS, 2022)

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Banten masih tinggi. Beberapa program penanggulangan kemiskinan telah diupayakan seperti Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. Namun, dengan program sebanyak itu Provinsi Banten masih memiliki angka kemiskinan yang besar.

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten dalam Perspektif Ekonomi Islam pada tahun 2017-2021 baik secara individu maupun simultan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin dalam perspektif ekonomi islam.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan teori dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah. Dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi terkait jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten bagi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, sehingga mampu digunakan sebagai poin-poin pemecahan akar masalah kemiskinan, perumusan solusi dan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan dan program pengentasan kemiskinan.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya ialah tahun penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tahun 2017-2021. Lalu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif (mix method). Peneliti tidak hanya menampilkan angka namun juga akan di deskripsikan dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Diduga indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

H2: Diduga upah minimum regional memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

H3: Diduga tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah penduduk miskin.

H4: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks pembangunan manusia, upah minimum regional dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin.

## **2. Kajian Pustaka (bold 12 pt)**

### **2.1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator utama yang mengukur kemajuan program pembangunan secara keseluruhan di suatu wilayah. IPM juga

digunakan untuk mengukur keberhasilan kualitas hidup yang mencakup tiga hal, antara lain: kesehatan (diukur dengan indikator harapan hidup), pendidikan (diukur dengan indikator angka melek huruf dan angka partisipasi gabungan SD, SMP, dan SMA) dan Ekonomi (diukur dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto/kapita berdasarkan Paritas Daya Beli) (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018).

Dalam Islam, indeks pembangunan manusia dikenal sebagai indeks pembangunan manusia islam atau *islamic human development index*. IHDi diukur berdasarkan indikator-indikator yang menggambarkan maqashid syariah. Lima dasar maqashid syariah antara lain yaitu menjaga agama (ad-din), menjaga jiwa (an-nafs), menjaga akal (al-'aql), menjaga keturunan (an-nasl), dan menjaga harta (al-mal) yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dijaga agar mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia maupun di akhirat (Asep Nurhalim, 2022).

## 2.2. Upah Minimum Regional

Upah minimum regional adalah upah terendah yang diterima oleh pekerja di suatu wilayah tertentu sesuai dengan standar undang-undang (Tanjung & Nawawi, 2022). Dalam studi Islam, upah didefinisikan sebagai Al-ujrah. Al-ujrah diklasifikasikan menjadi dua. Pertama Ujroh al-misli adalah upah yang didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Atau saat ini bisa disamakan dengan upah minimum regional. Kedua, Ujroh Samsarah adalah upah yang dibebankan atas suatu transaksi atau jasa, yang dipotong dari harga objek sebagai kompensasi atau imbalan (Solihin, 2018). *Ijarah* atau upah harus bertujuan pada dua aspek, yaitu aspek dunia dan aspek akhirat (FirmanSyah & Fauzy, 2017). Hadits yang dapat dijadikan dasar hukum mengenai upah, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, Kitāb: Hukum-Hukum, Bāb: Balasan bagi Penyewa, No. Hadits: 2434) (Monzer Kahf, 2022).*

## 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah penanda yang ditujukan untuk menghitung tenaga kerja yang tidak bisa terserap pasar kerja. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang telah memasuki angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha atau sudah memiliki pekerjaan namun belum bekerja (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2021). Ada dua jenis pengangguran, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi.

- a. Pengangguran Jabariyah. Situasi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan yang dapat digunakan sehingga ia terpaksa menganggur.
- b. Pengangguran Khiyariyah. Suatu keadaan dimana seseorang memiliki potensi dan kemampuan untuk bekerja namun tidak berusaha sehingga tidak memiliki

pekerjaan dan menjadi pengangguran (Subhan, 2018).

## **2.4. Jumlah Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dengan pendapatan per kapita di bawah rata-rata dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya baik dari segi makanan maupun non-makanan. Dalam Al-Quran, kata "miskin" disebutkan sebanyak 23 kali. Dalam Qamus Al-Muhit, "miskin" adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, atau dibungkam oleh kemiskinan (Hakim & Syaputra, 2020).

## **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan model penelitian regresi data panel dan alat analisis Microsoft Excel dan Eviews12. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh, artinya semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan sumber data sekunder, yang peneliti kumpulkan di Badan Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal, undang-undang, dan pemikiran yang berkaitan dengan Ekonomi Islam.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

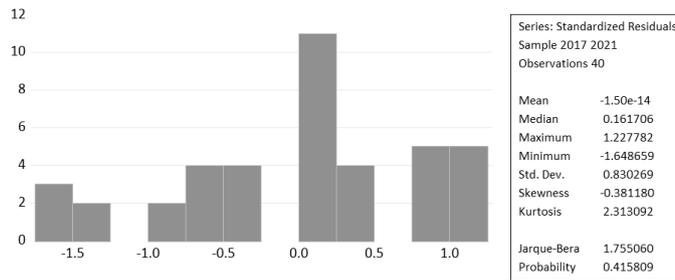
### **4.1. Hasil**

#### **A. Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Dalam model Regresi Data Panel terdapat tiga uji yang harus dilalui guna memilih model mana yang terbaik untuk digunakan pada uji-uji selanjutnya. Yang pertama adalah Uji Chow, hasilnya ialah prob. Cross section Chi square is  $0,0000 < 0,05$  artinya Fixed Effect Model terpilih. Yang kedua adalah uji Hausman, hasilnya ialah prob. value is  $0,5980 > 0,05$  artinya Random Effect Model terpilih. Yang terakhir yaitu uji Lagrange Multiplier, hasilnya ialah Both Breusch-Pagan value is  $0,0000 < 0,05$  artinya Random Effect Model terpilih. Dari tiga uji tadi maka ditetapkan Random Effect Model sebagai model terbaik yang akan digunakan untuk uji selanjutnya.

## B. Hasil Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasilnya ialah J-B probability of 0,415809 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

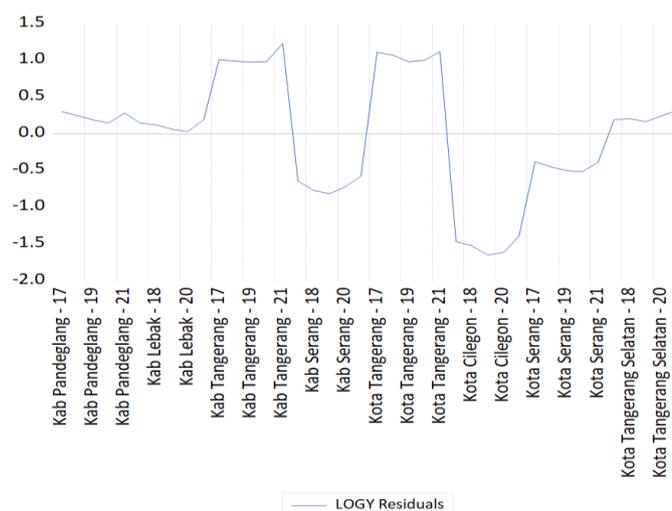
### b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	LOG X1	LOG X2	LOG X3
LOG X1	1.000000	0.674354	-0.387815
LOG X2	0.674354	1.000000	0.217595
LOG X3	-0.387815	0.217595	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, semua koefisien korelasi lebih kecil dari 0,8. Hal tersebut menyimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada data penelitian.

### c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik residual terlihat bahwa garis grafik berada pada kisaran -2 sampai 1,5 dan tidak melewati batas 500 dan -500. Hal ini berarti data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics	
Durbin-Watson stat	1.400944

Angka Durbin-Watson pada model di atas adalah 1,400944 yang berada di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi pada data.

C. Hasil Uji Hipotesis Statistik

Pada uji T, nilai konstanta adalah 16,71125. Hal ini berarti jika semua variabel independen sama dengan nol atau tidak mengalami perubahan maka variabel Kemiskinan adalah sebesar 16,71125. Koefisien regresi variabel IPM diperoleh nilai koefisien -7,354108 dengan nilai prob. 0,0755 > 0,05, artinya variabel IPM tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Koefisien regresi variabel UMR diperoleh nilai koefisien sebesar 1,214768 dengan nilai prob. 0,0001 < 0,05, artinya UMR berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Koefisien regresi variabel TPT diperoleh nilai koefisien 0,278543 dengan nilai prob. 0,0179 > 0,05, artinya variabel TPT berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Hasil uji F diperoleh nilai prob. F statistik menunjukkan 0,000000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,624541. Hal ini berarti data dapat menjelaskan hubungan antara IPM, UMR dan TPT sebesar 62% sedangkan sisanya sebesar 38% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam data.

**4.2. Pembahasan**

Nilai koefisien menunjukkan -7,354108 dengan nilai prob. menunjukkan 0,0755 > 0,05 yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis atau teori dari penelitian terdahulu yang merupakan dasar penelitian ini. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Ahmad Syaifullah dan Nazaruddin Malik dengan judul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Asean-4 (Studi pada 4 Negara Asean)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa ketiga aspek yaitu angka harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak tidak dapat menentukan peningkatan atau penurunan kemiskinan di Banten. Aspek harapan hidup yang diukur dengan indikator angka harapan hidup belum menyentuh masyarakat miskin secara keseluruhan. Kemudian aspek pengetahuan yang diukur dengan indikator angka melek huruf dan gabungan dari angka partisipasi sekolah belum dapat dirasakan oleh masyarakat miskin secara merata. Dan standar hidup layak yang diukur dengan indikator PDRB belum mencerminkan perekonomian masyarakat miskin. Karena PDRB merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat lokal dan asing di

suatu daerah. Artinya, tingginya produksi barang dan jasa yang beredar di suatu daerah belum tentu dimiliki oleh penduduk setempat. Sebagai solusi alternatif, terdapat indeks pembangunan manusia Islam yang memiliki banyak aspek untuk dapat menghitung tingkat kualitas manusia secara lebih rinci. Indeks Pembangunan Manusia Islam terdiri dari lima dimensi yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dimensi-dimensi tersebut adalah Indeks Ad-Dien yang mewakili agama, Indeks An-Nafs yang mewakili kesehatan, Indeks Al-'Aql yang mewakili pengetahuan, Indeks An-Nasl yang mewakili keluarga dan keturunan, serta Indeks Al-Maal yang mewakili harta dan pendapatan. Seperti pada penelitian Khairul Fadilah (2019) menunjukkan hasil dari IHDI secara signifikan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta. Serta penelitian dari Nasyitha (2020) yang memperoleh hasil IHDI secara signifikan dapat menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Nilai koefisien menunjukkan 1,214768 dengan nilai prob. menunjukkan 0,0001 > 0,05 yang menyatakan bahwa variabel UMR berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis atau teori dari penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Shinta Setya Ningrum dengan judul "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015" dan penelitian Novia Rahmawati, dkk "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan UMR berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Dalam teori neoklasik standar (pasar persaingan), jika upah minimum tinggi maka akan diiringi dengan kualifikasi pekerjaan yang tinggi dan persaingan tenaga kerja akan meningkat. Jika upah minimum tinggi namun kemiskinan juga tinggi, hal ini disebabkan karena kurangnya daya saing tenaga kerja dalam negeri terhadap tenaga kerja asing yang menyebabkan penduduk pribumi menjadi pengangguran. Jadi meskipun upah minimum di suatu daerah tinggi, kemiskinan juga tinggi. Selain itu, dalam teori pasar tenaga kerja disebutkan bahwa jika terjadi kenaikan upah, maka akan terjadi penurunan tenaga kerja. Perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mengurangi biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja dalam bentuk upah. Peningkatan pengangguran mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hanya sebagian kecil masyarakat miskin yang dapat bekerja dan mendapatkan upah minimum, sehingga kebijakan kenaikan upah minimum tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan (Rahmawati et al., 2022). Namun rezeki tidak hanya didapat melalui upah minimum ada banyak cara untuk bisa mendapatkan penghasilan sebagai ikhtiar agar terhindar dari kemiskinan. Untuk itu peningkatan soft skill dan hard skill diharuskan. Tidak hanya itu, manusia juga dituntut berusaha, berdoa dan bertawakkal. sebagaimana dalam Surah At Talaq (65) Ayat 3 serta selalu bersyukur atas apa yang telah didapatkan sebagaimana dalam Surah Ibrahim (14) Ayat 7.

وَأَذِّنْ تَادَانَ رَبُّكُمْ لِيَنَّ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلِيَنَّ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧

*Artinya: "(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras". (Q.S. Ibrahim (14) Ayat 7)*

Nilai koefisien menunjukkan 0,278543 dengan nilai prob. menunjukkan 0,0179 > 0,05 yang menyatakan bahwa variabel TPT berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis atau teori dari penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aulia Nur Azizah, dkk dengan judul "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur" dan penelitian Ari Kristin Prasetyoningrum, dkk dengan judul "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia" yang sama-sama memperoleh hasil bahwa pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan seperti hasil penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan dampak yang kuat dari pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Kurangnya pendapatan dari pekerjaan secara signifikan mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Menurut Surat At-Taubah ayat 105, manusia diharapkan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, menjadikan pekerjaan tidak hanya sebagai ibadah tetapi juga elemen penting dalam kehidupan. Dalam Islam, pengangguran tidak diterima, seperti yang dinyatakan dalam Surat al-Jumu'ah ayat 10. Hal ini mencerminkan pentingnya bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat dalam ajaran Islam, serta pentingnya menghindari pengangguran yang dapat menyebabkan kemiskinan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٠

*Artinya: "Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Q.S. Surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10)*

Nilai koefisien 17,05406 dengan nilai prob. sebesar 0,000000 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti setiap kenaikan indeks pembangunan manusia, upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama sebesar 1% maka akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 17,05406%. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Shinta Setya Ningrum (2017) yang berjudul "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di

Indonesia Tahun 2011-2015” dan penelitian oleh Novia Rahmawati, Panji Kusuma Prasetyanto dan Fitrah Sari Islami (2022) yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)”. Hal ini berarti indeks pembangunan manusia, upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka memberikan kontribusi yang sangat penting dalam kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Temuan-temuan ini dapat dirangkum yaitu IPM memiliki pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, UMR memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemiskinan, TPT memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemiskinan dan variabel IPM, UMR dan TPT secara simultan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada variabel UMR jika pada kebanyakan penelitian kenaikan UMR bisa mengurangi kemiskinan, pada penelitian ini hasilnya berbanding terbalik. Jika UMR naik maka kemiskinan akan naik. Hal ini dikarenakan Provinsi Banten memiliki kawasan industri yang luas namun tidak diimbangi dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Terbukti dari data IPM Banten selama 7 tahun terakhir tidak menunjukkan adanya kenaikan. Dan hasil dari penelitian ini IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena indikator dari IPM itu sendiri yang mencakup kesehatan, pendidikan dan ekonomi belum tersentuh secara merata oleh masyarakat miskin. Adapun beberapa saran dan masukan yang relevan dengan hasil penemuan ini, antara lain:

1. Untuk pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memperluas akses penyuluhan kesehatan dan penyuluhan ekonomi kreatif hingga ke daerah-daerah kecil dan memastikan akses tersebut tersalurkan kepada masyarakat miskin. Dalam hal pendidikan perlu adanya pengawasan agar pendidikan dapat terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat umum dan menerapkan kebijakan yang dapat mendorong masyarakat umum untuk menjadi pemilik usaha yang mandiri sehingga dapat mengatur kebutuhan masyarakatnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pembaca, memberikan ide baru dan menyumbangkan karya terhadap literatur-literatur yang ada. Bagi peneliti selanjutnya, pertimbangan variabel yang relevan dengan tempat penelitian harus dicermati sebelum memulai penelitian. Alat analisis, metode dan periode penelitian sebaiknya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya agar lebih menjelaskan keadaan yang sebenarnya.

## 6. Daftar Pustaka

- Asep Nurhalim, L. M. dan R. F. (2022). Pengaruh Zakat dan Islamic Human Development Index terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017–2020. *Al-Muzara'ah*, 10.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 12, 2023, from <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2021). *Keadaan Ketenagakerjaan Banten Agustus 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- FirmanSyah, R., & Fauzy, M. Q. (2017). Sistem Upah Minimum Kabupaten dalam perspekti Islam (Studi kasus pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(6), 315535.
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629–644.
- Monzer Kahf. (2022). *Ayat & Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Rahmawati, N., Prasetyanto, P. K., & Islami, F. S. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Regional (UMR), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 19–31.
- Solihin, B. (2018). Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR). *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 1(1), 19–31.
- Subhan, M. (2018). Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.
- Tanjung, I., & Nawawi, Z. M. (2022). Analisis Strategi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumater Utara terhadap Pemenuhan Upah Minimum Regional (UMR) bagi UKM di Kota Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1322–1338.